



▶ PELAYANAN KESEHATAN

Jamkesda 2019 untuk Warga Miskin

JOGJA—Mulai 2019, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bakal mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Meski begitu, Pemkot tetap mengalokasikan dana Jamkesda untuk mengatasi warga miskin yang tidak terampu BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jogja, Fita Yulia, menjelaskan anggaran Jamkesda tahun depan masih disediakan oleh Pemkot meskipun program Jamkesda harus terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.

"Anggaran Jamkesda tahun depan itu anggaran untuk *buffer* (cadangan). Misalnya ada bayi lahir dari orang tidak mampu secara ekonomi, itu belum terlayani BPJS Kesehatan. Itu yang akan kami bantu," katanya, Senin (5/11).

Pada RAPBD 2019, Pemkot mengusulkan dana Jamkesda sekitar Rp25 miliar untuk anggaran Jamkesda dan Peserta Dibiayai Pemerintah Daerah (PDPD). Anggaran tersebut juga memperkirakan potensi warga miskin yang tidak terampu BPJS Kesehatan. Penganggaran tersebut juga untuk mengantisipasi layanan kesehatan di rumah sakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

"Ini khusus peserta dari warga miskin kota. Misalnya anggaran darah yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan," katanya.

Jadi anggaran Jamkesda, lanjutnya, juga untuk menambahkan bantuan anggaran yang dibutuhkan pasien dari masyarakat miskin. Pemanfaatan anggaran Jamkesda 2019 bagi warga miskin dan tidak mampu bisa mendaftar melalui puskesmas dan Dinkes.

"Warga miskin yang belum punya jaminan harus aktif mendaftar untuk mendapat PDPD itu. Desember kami rencananya mendata. Kami siapkan dulu. Ada berita acara pernyataan dari warga yang mau jadi PDPD tapi harus mau dirawat di kelas tiga," katanya.

Kepala Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinkes Jogja, Umi Nur Chariyati, mengatakan anggaran untuk Jamkesda dan PDPD BPJS Kesehatan itu masih dilakukan perhitungan ulang. Kebutuhan anggaran tersebut atas rekomendasi Dewan.

"Jamkesda yang ada untuk *njagani* warga yang belum masuk maupun yang tidak bisa diikuti BPJS Kesehatan. Misalnya untuk mengatasi kesehatan bagi gelandangan pengemis. Itu tidak mungkin ikut BPJS Kesehatan, karena gelandangan tidak punya nomor induk kependudukan dan KTP," kata Umi.

(Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005